



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKJIP)
TAHUN 2020**

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang, Karanganyar Kode pos : 57711

Telp. (0271) 495925, 495141 Fax. 494705

Website : www.dishubpkp.karanganyarkab.go.id

E-mail : dishubpkp@karanganyarkab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

19690215 199001 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Karanganyar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar -----	9
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah -----	18
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan -----	19
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tujuan Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan-----	19
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan -----	20
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah-----	21
Tabel 3.7	Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-----	21
Tabel 3.8	Realisasi Pelaksanaan Program Kerja -----	28

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar isi	iv
BAB I P E N D A H U L U A N	1
A. Fungsi Strategis	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Gambaran Umum Dinas	6
E. Sistematis Laporan	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	10
A. Rencana Strategis	10
1. Tujuan	10
2. Sasaran	10
B. Ringkasan Rencana Kinerja Utama	11
C. Ringkasan Perjanjian Kinerja	13
D. Rencana Anggaran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Skala Pengukuran	20
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
C. Pengukuran Kinerja	21
D. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Fungsi Strategis Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksud, maka Dinas Perhubungan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah di bidang Perhubungan, bidang Lalu lintas dan Angkutan, dan Prasarana dan keselamatan . Secara singkat Dinas Perhubungan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sistem jaringan angkutan orang dan barang, merumuskan bahan rekomendasi perizinan di bidang angkutan umum, perizinan agen bus umum dan fasilitas terminal.
2. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal angkutan orang dan barang.
3. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pemilik kendaraan wajib uji tentang persyaratan kelaikan teknis kendaraan bermotor.
4. Merumuskan bahan kebijakan dan berbagai ketentuan di bidang lalulintas untuk mewujudkan kondisi lalulintas yang aman, lancar, tertib dan teratur.
5. Merumuskan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pengaturan dan keselamatan lalu lintas serta sarana kelengkapan jalan lainnya.
6. Merumuskan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Analisa Dampak lalulintas dari pihak ketiga dalam setiap pembangunan fasilitas umum.

B. Maksud dan tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi

salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang-undang No. 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - i. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- t. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang

Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah;

- u. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- v. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- w. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- x. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- y. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- z. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- aa. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- bb. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- cc. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. Salah satu diantaranya adalah Dinas Perhubungan adalah menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kelembagaan, kinerja aparatur pemerintahan daerah, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan ditetapkan dalam Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, pasal 11, yaitu :

1. Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

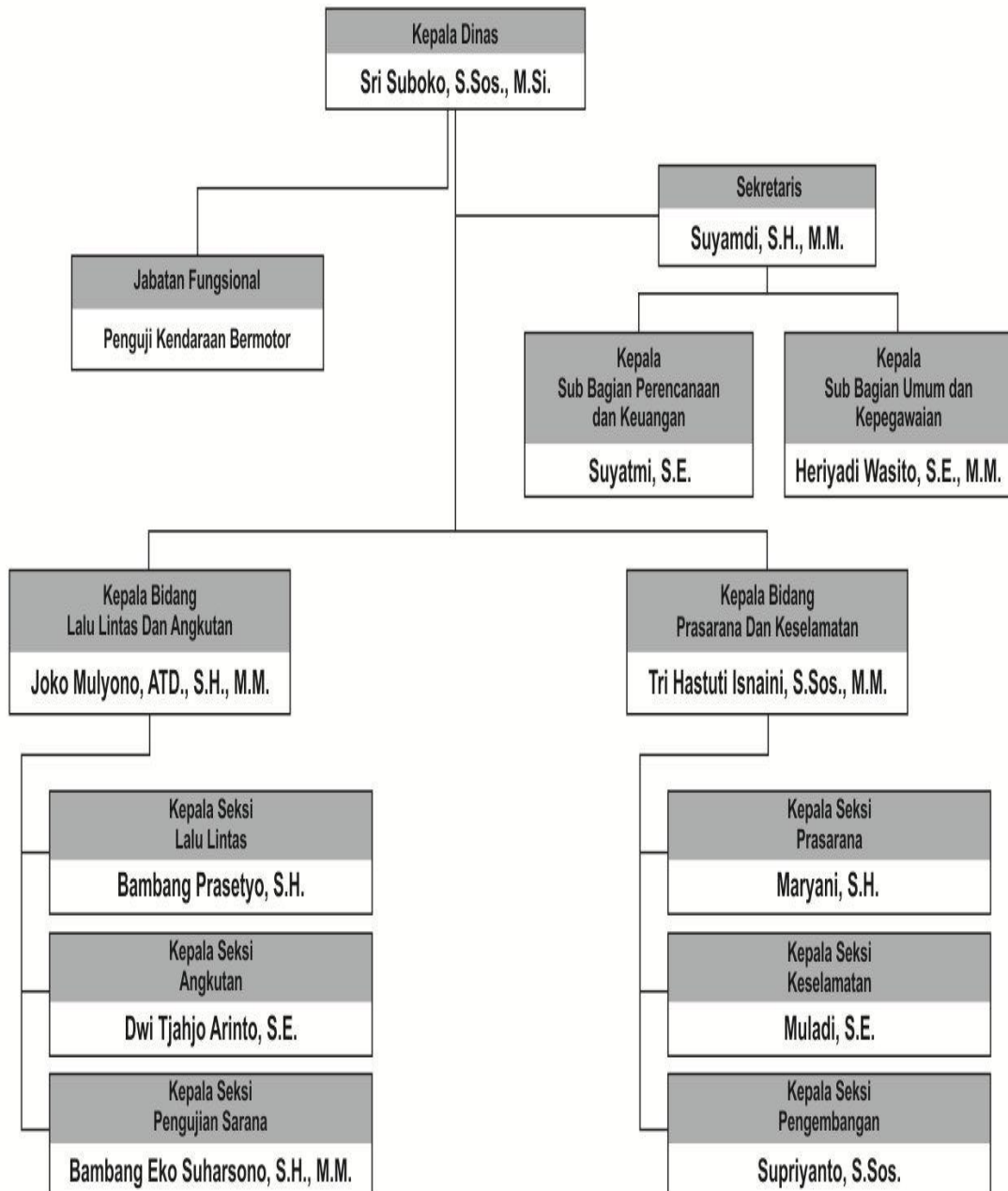
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan yang meliputi Perhubungan, Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan, serta Kesekretariatan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan yang meliputi Perhubungan, Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan serta Kesekretariatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan yang meliputi Perhubungan, Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan, serta Kesekretariatan;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perhubungan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR



E. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020. Selanjutnya Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, landasan hukum penulisan laporan, Maksud dan Tujuan, Gambaran umum Organisasi, dan Sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi: Rencana Strategis Tahun 2018–2023, dan Perencanaan Kinerja Tahun 2020, serta Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Anggaran.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi: Skala Pengukuran, Capaian indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi: Kesimpulan, Saran dan Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

“Terwujudnya infrastruktur menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan”

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Secara rinci Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan sebagaimana disajikan dalam. **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan pelayanan transportasi darat	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat melalui reformasi birokrasi, pengembangan fasilitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan fasilitas alih moda yang memadai dan meremajakan armada angkutan umum.	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas alih moda yang memadai

B. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah merumuskan Tujuan dan Sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

1. Tujuan dan Sasaran

Sasaran merupakan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan

Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan transportasi darat

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

2. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Sesuai dengan perkembangan kebijakan terhadap aturan perundang-undangan, maka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mendatang (2020) diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f) Penyediaan alat tulis kantor
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j) Penyediaan makanan dan minuman
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c) Pengadaan peralatan gedung kantor
- d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- f) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Peningkatan SDM

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan Produk Hukum Daerah

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
- b) Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL
- c) Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan perparkiran
- d) Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan high mast
- e) Pengadaan dan pemasangan Lampu PJU dan High Mast
- f) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

- g) Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah
- 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
- 7. Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
 - b) Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran
 - c) Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran
- 8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a) Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b) Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)
- 9. Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a) Penjagaan Perlindungan Palang Kereta Api
 - b) Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan
 - c) Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L
 - d) Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day
 - e) Penyelenggaraan WTN
 - f) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan daerah

3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2020. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Perhubungan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2020 dituangkan ke dalam 9 (Sembilan) program, yaitu : Program pelayanan administrasi perkantoran ¹, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ², Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan ³, Program

pembangunan prasarana fasilitas perhubungan ⁴, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor ⁵, Program peningkatan pelayanan angkutan ⁶, Program peningkatan Pengawasan dan penertiban lalu lintas ⁷, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ⁸, Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ ⁹, kemudian dijabarkan ke dalam 40 (empat puluh) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 11.470.763.000,00 (Sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh puluh enam tiga ribu rupiah) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 4.035.831.000,00 dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 7.434.932.000,00. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Dinas Perhubungan dengan Bupati Karanganyar Tahun 2020 secara lengkap tercantum sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan : BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUPATI KARANGANYAR

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

ttd

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	75 %

Program		Anggaran	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	333.870.500
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp.	234.500.000
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	124.500.000
4	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp.	1.546.463.500
5	Program rehabilitasidan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rp.	182.844.700
6	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rp.	750.287.300
7	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.	0
8	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp.	557.600.000
9	Program peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas	Rp.	305.765.000
JUMLAH		Rp.	4.035.831.000

Karanganyar,

2020

BUPATI KARANGANYAR**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR****Drs. H. JULIYATMONO, M.M.****SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.**

Kegiatan/Program SEKRETARIAT		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	42.500.000	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	121.938.000	DAU
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.200.000	DAU
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.000.000	DAU
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	DAU
6	Penyediaan alat tulis kantor	31.712.000	DAU
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000	DAU
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	DAU
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	DAU
10	Penyediaan makanan dan minuman	16.820.000	DAU
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57.800.000	DAU
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	136.000.000	DAU
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	DAU
14	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	46.000.000	DAU
15	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	124.500.000	DAU
16	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	DAU

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN		
1	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	553.901.000	DAU
2	Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah	36.000.000	DAU
3	Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan parkir	8.520.000	DAU
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	77.490.500	DAU
5	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum dan high mast	285.052.000	DAU
6	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU dan Hight Mast	285.052.000	DAU
7	Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	300.000.000	DAU

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	182.844.700	DAU
2	Penyelenggaraan posko angkutan lebaran	22.000.000	DAU
3	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	454.600.000	DAU
4	Peningkatan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	103.000.000	DAU
5	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	75.000.000	DAU
6	Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	69.180.000	DAU
7	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	21.625.000	DAU
8	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	139.960.000	DAU
9	Fasilitas pelaksanaan kegiatan daerah	0	DAU
10	Penyelenggaraan WTN	0	DAU
11	Pelayanan angkutan mudik lebaran	12.317.000	DAU
12	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	235.970.000	DAU
13	Penyelenggaraan posko pemantuan penumpang	480.000.000	DAU

4. Rencana Anggaran

Struktur anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.468.990.000, belanja tidak langsung Rp. 7.434.932.000 dan belanja langsung Rp. 4.035.831.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI	KRITERIA	KODE
	REALISASI	PENILAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

B. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian IKU Tahun 2020

No.	Indikator kinerja Utama	Capaian 2020		Capaian
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase rekomendasi ijin perdesaan/ perkotaan trayek () yang dikeluarkan	75 %	70 %	93,3 %

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2020

C. Pengukuran dan Analisis Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan

Indikator tujuan Dinas Perhubungan secara eksplisit tercantum pada dokumen RENSTRA tetapi merupakan penjabaran dari indikator kinerja tujuan dibandingkan terhadap target akhir periode RENSTRA seperti pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan

No.	Indikator kinerja Utama	Capaian 2020		Capaian
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase layanan angkutan darat	7%	3,4%	48,57 %

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2020

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Hasil Thn. 2020 (%)	Target Akhir Renstra(%)	Capaian 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase layanan angkutan darat	3,4%	10%	48,57%

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2020

Capaian kinerja tujuan Dinas Perhubungan untuk tahun 2020 diatas sebesar **48,57 %** dikategorikan **sangat rendah**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat di kali

100 di kali 100%. Penyebab rendahnya persentase pelayanan angkutan darat pada indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah dampak dari pandemi COVID-19 dimana terjadinya pembatasan jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum serta aktivitas masyarakat yang menggunakan angkutan umum cukup berkurang banyak. Serta sedikitnya angkutan darat yang beroperasi pada saat pandemi COVID-19 sehingga memberikan dampak yang sangat luar biasa pada pelayanan angkutan darat.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

Pada tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2020, yaitu :

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran yang dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	%	75 %	70 %	93,3 %
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					93,3 %

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2020

Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2020 diatas sebesar **93,3 %** dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah ijin trayek yang direkomendasi dibagi jumlah ijin trayek keseluruhan di kali 100%

Formula Penghitungan prosentase berdasarkan Jumlah ijin trayek yang direkomendasi 14 dibagi jumlah ijin trayek keseluruhan 20 di kali 100% hasil 70%

Program pendukung sasaran 1 antara lain :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Pogram peningkatan pelayanan angkutan
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
4. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
6. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

3. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Untuk IKD (Indikator Kinerja Daerah), sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, terdapat 1 (satu) indikator Urusan Perhubungan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2020		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Penurunan Angka Kecelakaan	Rasio	0,69	0.71	97,10 %

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran indikator kinerja daerah sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sasaran indikator daerah

Capaian kinerja sasaran indikator daerah tahun 2020 adalah sebesar 97,10% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

b. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2020, berdasarkan laporan tahunan situasi keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas Polres Karanganyar sampai tanggal 31 Desember 2020, kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 1.048 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020

No	KECELAKAAN LALU LINTAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	Jumlah
1	Jumlah Kejadian	116	133	93	51	68	66	72	96	93	88	107	65	1.048
2	Korban Meninggal Dunia	15	8	10	4	7	6	7	4	9	5	7	7	89
3	Korban Luka Berat	-	-	4	-	6	1	1	1	-	-	-	1	14
4	Korban Luka Ringan	137	147	104	63	69	88	78	104	72	100	120	68	1.150
5	Kerugian Materiil (Rp. Ribuan)	42.100	40.400	29.200	17.600	25.400	25.100	22.900	31.500	33.400	33.100	39.300	35.700	375.700

Sumber : Polres Karanganyar, 2020

Data tersebut menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi;
- 2) Faktor kendaraan, terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laek jalan;
- 3) Faktor prasarana dan lingkungan.

Faktor manusia memiliki kontribusi terbesar terjadi kecelakaan yang disebabkan lengah, mengantuk, mabuk, lelah, tidak terampil, tidak tertib dan kecepatan tinggi. Pengendara yang lengah, mengantuk, mabuk, lelah, tidak terampil, tidak tertib dan kecepatan tinggi menyebabkan terjadi kecelakaan yang dapat menimbulkan korban meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pada saat pengendara lengah, mengantuk, mabuk, lelah, tidak terampil, tidak tertib dan kecepatan tinggi terjadi penurunan daya konsentrasi dan sikap responsibilitas dalam berkendara, ditambah lagi bila mengemudi dengan kecepatan tinggi.

Penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan antara lain : kondisi rem yang kurang baik, ban pecah, selip, serta tidak ada atau tidak menyalanya lampu kendaraan terutama mengemudi pada malam hari.

Faktor lingkungan fisik yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dapat dikarenakan : jalan berlobang, jalan rusak, jalan licin, jalan menikung, lampu jalan tidak ada dan hujan.

4. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 yaitu :

- 1) SDM sebagai sumber daya organisasi belum optimal baik dari sisi integritas maupun kompetensi. Integritas yang kurang optimal ditandai dengan rendahnya disiplin, sementara masalah kompetensi ditandai dengan minimnya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang Ahli Transportasi, kurang responnya terhadap permasalahan, kurangnya inovasi dan monoton terhadap persoalan-persoalan substansi tugas pokok dan fungsi. Masalah leadership juga cukup menonjol terutama di dalam aspek manajemen yang bersifat teknis.
- 2) Alat Uji Kendaraan Bermotor rata-rata sudah berumur tua sehingga penggunaannya tidak optimal, Sarana Prasarana Keselamatan Jalan sering mengalami kerusakan karena faktor cuaca dan kondisi dan kurangnya kendaraan operasional lapangan yang digunakan untuk kegiatan rutin.

- 3) Pada kegiatan-kegiatan tertentu, pelaksanaannya bersifat monoton tidak ada inovasi maupun survey terhadap dampak kegiatan sehingga keberhasilan kinerja output tidak bisa mewakili gambaran outcome.
- 4) Belum tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam membudayakan tertib berlalu lintas dan tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan atau jaringan jalan.
- 5) Terbatasnya anggaran APBD yang dikelola sehingga pencapaian sasaran melalui beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara bertahap baik itu dibidang Perhubungan , LLAJ,
- 6) Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas.

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2020, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 11.470.763.000,00 ,- (Sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh puluh enam tiga tibu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 7.434.932.000,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.010.279.000.- |
| 3. Belanja Modal sebesar | Rp. 725.552.000,- |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Pelaksanaan Program Kerja

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	333.870.500	331.978.677	99,43
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	5.785.600	96,43
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	121.938.000	121.414.154	99,57
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.200.000	23.042.600	99,32
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.000.000	37.800.000	99,47
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	14.994.000	99,96
6	Penyediaan alat tulis kantor	31.712.000	31.712.000	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000	12.865.250	98,89
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	4.999.850	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	4.950.000	91,67
10	Penyediaan makanan dan minuman	16.820.000	16.815.000	99,97
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57.800.500	57.609.223	99,67
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.500.000	222.797.100	95,01
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	42.500.000	42.405.000	99,78
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	136.000.000	124.428.600	91,49
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	46.000.000	45.983.500	99,96
C	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0
1	Peningkatan SDM	0	0	0
C	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	124.500.000	121.561.000	97,64
1	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	124.500.000	121.561.000	97,64
2	Penyusunan Produk Hukum	0	0	0
D	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.546.463.500	1.535.386.111	99,28
1	Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah	36.000.000	36.000.000	0
2	Pemimngkatan pengelolaan terminal angkutan darat	553.901.000	553.897.500	100,00
3	Rehabilitasi /Pemeliharaan APILL	77.490.500	76.727.500	99,02
4	Pengaturan , pengendalian dan penataan kegiatan perpajakan	8.520.000	8.473.500	99,45
5	Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan high mast	285.500.000	283.550.000	99,32
6	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU dan high mast	285.052.000	284.694.000	99,87
7	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	300.000.000	292.044.111	97,35

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
E	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	386.525.000	383.570.500	99,24
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	182.844.700	180.760.910	98,86
F	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	702.975.000	685.310.569	97,49
1	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	235.970.000	235.406.500	99,76
2	Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	12.317.300	12.317.300	100,00
3	Penyelenggaraan posko angkutan lebaran	22.000.000	19.789.184	89,95
4	Penyelenggaraan posko pemantuan penumpang	480.000.000	479.084.850	99,81
G	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	928.500.000	881.701.500	94,96
1	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	454.600.000	454.359.484	99,95
2	Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	103.000.000	102.000.000	99,03
H	Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	453.000.000	437.854.800	96,66
1	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	75.000.000	74.982.500	99,98
2	Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	69.180.000	69.180.000	100,00
3	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	21.625.000	20.794.752	96,16
4	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	139.960.000	129.770.000	92,72
5	Fasilitas pelaksanaan kegiatan daerah	43.000.000	42.865.000	99,69
6	Penyelenggaraan WTN	20.000.000	8.000.500	40,00
	JUMLAH TOTAL	4.035.831.000	3.990.168.368	98,87

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pengukuran serta analisis terhadap rencana kegiatan, rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator output dan pencermatan terhadap outcome yang telah berhasil dicapai, diperoleh gambaran mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2020.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 56 kegiatan yang meliputi 16 kegiatan rutin dan 12 kegiatan pengadaan. Secara khusus sasaran strategis terlihat dari indikator-indikator kegiatan non rutin yang masuk dalam 15 program dibawah ini:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
5. Program peningkatan pelayanan angkutan
6. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
8. Program peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas
9. Program rehabilitasidan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2020 dapat berjalan efektif dan efisien. Tugas-tugas yang diberikan telah dilaksanakan secara benar, terorganisir dan berjalan sesuai jadwal. Dalam hal kinerja keuangan, serapan anggaran terlaksana secara maksimal, terlihat dari anggaran sebesar Rp. 4.035.831.000 ,00 realisasi sebesar Rp. 3.990.168.368,00 atau 98,87% dari total anggaran. Semua keberhasilan pencapaian kinerja tidak semata-mata dinilai dari terserapnya anggaran dan terwujudnya output kegiatan, namun secara keseluruhan upaya mewujudkan kinerja yang optimal adalah hasil dari dijalankannya fungsi manajemen. Konsekuensi menjalankan fungsi manajemen dengan mengoptimalkan alat-alat sarana (tools) manajemen berimbang pada tercapainya 1 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat ;

Namun disadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja tidak luput dari permasalahan, dan kendala yang ada. Oleh karena itu keberhasilan ini selalu

masih menyisakan kekurangan-kekurangan yang harus diselesaikan dan dituntaskan dengan mengedepankan solusi.

B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Adapun strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diformulasikan pada analisa matrik SWOT sebagai berikut :

		KEKUATAN	KELEMAHAN
	Faktor Internal	Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
	Faktor Eksternal	Tersedianya fasilitas pengendali traffic light secarater padu dengan menggunakan ATCS	Peralatan yang dimiliki sekarang ini sangatlah terbatas jumlahnya dan belum maksimal
		Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan menggunakan CCTV	Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki
		Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	Gedung pengujian yang digunakan saat ini sudah tua dan memerlukan perawatan yang memakan biaya cukup tinggi tiap tahunnya
		Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peralatan pengujian yang digunakan saat ini sudah cukup berumur sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi
TANTANGAN		Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secarater padu melalui	Pengintegrasian system jaringan jalan dengan kebijakan tataruang wilayah yang merupakan acuan

	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan dengan sudah mulai berumurnya peralatan-peralatan yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor serta belum tercukupinya tenaga teknis penguji ;	penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan penegakan hukum dan disiplin dijalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah.	pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan system pasaranlainnya
TANTANGAN	Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi pada saat liburan atau pun long weekend sehingga menambah kemacetan diberbagai ruas jalan ;	Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secarater padu melalui penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan penegakan hukum dan disiplin dijalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah.	Pengintegrasian system jaringan jalan dengan kebijakan tataruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan system pasaranlainnya
	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalammentaati peraturan lalu lintas sertafasilita keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasirawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan ;		

Pada tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar setidaknya terdapat 1 sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

1. Terwujudnya sarana prasarana penunjang lalu lintas untuk mendukung kelancaran lalu lintas;

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

19690215 199001 1 002

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR			
URUSAN : Perhubungan			
TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> • Formula Perhitungan : Jumlah ijin trayek yang direkomendasi dibagi jumlah ijin trayek keseluruhan di kali 100% • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Perhubungan Perumahan Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690215 199001 1 002

RENCANA AKSI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
Tahun : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENCAPAIAN TARGET 2020				PROGRAM	KEGIATAN			PENCAPAIAN TARGET 2020			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4				5	6			7	8	9	10
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	65%	68%	69%	72%	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pengolaan terminal angkutan darat	Persentase Terminal Tipe C yang sesuai dengan Standar	%	20%	50%	80%	100%
								Pembangunan sarana dan prasarana dan prasarana perhubungan	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	20%	40%	70%	100%
								Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan perpikiran	Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	20%	50%	70%	100%
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	10%	50%	80%	100%
							Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Penyelenggaraan posko pemantuan penumpang	Jumlah orang melalui terminal per tahun		20%	50%	70%	100%
							Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	20%	50%	80%	100%
							Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	Operasi penertiban dan pemeriksaan kendaraan	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	30%	60%	80%	100%

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690215 199001 1 002

RENCANA KERJA TAHUNAN

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	77 %

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
19690215 199001 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin perdesaan/ perkotaan trayek yang dikeluarkan	75 %	70 %	93,3 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020

Rp. 4.035.831.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

Rp. 3.990.168.368

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PROGRAM	SASARAN PROGRAM (Output)	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (Output)	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET					
						2019	###	2021	###						2023	2019	2020	2021	2022					2023	2019	2020	2021	2022	2023
										Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terwujudnya pemasangan rambu - rambu	Persentase pemasangan rambu rambu	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100	persen	65	100	100	100	100	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan traffic light	Jumlah pengadaan dan pemasangan traffic light	paket	1	PROGRAM TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2020 - 2024				

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196902151990011002